



Implementasi Governansi Digital Di Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga: Analisis Transformasi Kebijakan Menuju Optimalisasi Bonus Demografi Indonesia

Alfa Rehan Oktori Rahmadana^{1*}

Universitas Negeri Padang

Email: alfarehanor23@gmail.com

Abstrak

History Artikel:

Diterima 1 Desember 2025

Direvisi 3 Desember 2025

Diterima 5 Desember 2025

Tersedia online 6 Desember 2025

Indonesia tengah memasuki fase krusial bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga 2040, menghadirkan peluang besar sekaligus risiko apabila tidak dikelola secara strategis. Transformasi governansi digital di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menjadi fondasi utama dalam memperkuat kualitas kebijakan kependudukan melalui modernisasi pendataan, peningkatan akurasi informasi keluarga, serta integrasi sistem lintas program dan lembaga. Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan aplikasi-aplikasi digital terkait memungkinkan proses pengambilan keputusan bergerak dari model manual yang lambat menuju mekanisme berbasis bukti yang real-time dan responsif. Namun, implementasi digital governance masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur desa, fragmentasi sistem birokrasi, dan persoalan keamanan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus instrumental di BKKBN untuk menganalisis arsitektur governansi digital, tantangan struktural implementasinya, dan kontribusinya terhadap optimalisasi bonus demografi melalui refocusing Program Bangga Kencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governansi digital tidak hanya memperkuat efektivitas pendataan dan monitoring, tetapi juga meningkatkan ketepatan intervensi stunting, kualitas ketahanan keluarga, serta efisiensi kebijakan reproduksi dan pembangunan keluarga. Dengan tata kelola digital yang matang dan kolaboratif, Program Bangga Kencana berpotensi menjadi katalis utama dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kata kunci:

Governansi Digital, Bonus Demografi, Bangga Kencana, SIGA, Kebijakan Kependudukan, BKKBN, Transformasi Digital Pemerintahan.

Pendahuluan/ مقدمة

Indonesia berada pada titik krusial transisi demografis dengan proyeksi 196 juta penduduk usia produktif pada periode 2025-2040, menciptakan window of opportunity yang belum pernah terjadi dalam sejarah demografi nasional (BPS, 2024; Sukamdi, 2025). Fenomena bonus demografi ini, ditandai dengan dependency ratio di bawah 50 persen, membawa implikasi ganda: peluang akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus risiko bencana demografis jika tidak dikelola secara strategis (Bloom, Canning & Sevilla, 2003; United Nations, 2024). Kompleksitas tantangan semakin nyata dengan realitas 19,8% prevalensi stunting, 17,45% pengangguran usia muda, rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal (36,32%), dan dominasi pekerja informal yang mencapai 60% angkatan kerja (BPS, 2024; Wihaji, 2025).

Dalam konteks ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) mengalami transformasi kelembagaan fundamental melalui adopsi governansi digital sebagai tulang punggung kebijakan kependudukan (Peraturan Kepala BKKBN No. 6 Tahun 2024). Transformasi ini melampaui sekadar otomasi layanan publik, melainkan merupakan reorientasi paradigmatis dari pendekatan top-down ke ekosistem kebijakan berbasis data, interaktif, dan responsif terhadap dinamika demografis lokal (Dunleavy et al., 2006; Gil-García, 2012).

Literatur governansi digital menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan bergantung pada integrasi tiga dimensi: teknologi, manusia, dan organisasi (Janowski, 2015; Mergel, Edelman & Haug, 2019). OECD Digital Government Policy Framework mengidentifikasi enam dimensi maturitas pemerintahan digital: digital by design, data-driven public sector, government as a platform, open by default, user-driven, dan proactiveness (OECD, 2020). Namun, implementasi di negara berkembang menghadapi tantangan struktural unik seperti ketimpangan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan resistensi birokrasi (Bertot, Jaeger & Grimes, 2010; Dawes, 2008).

Penelitian ini mengisi gap literatur dengan menganalisis implementasi governansi digital di institusi spesifik (BKKBN) yang menangani isu multidimensi (kependudukan, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga) dengan karakteristik geografis Indonesia yang kompleks. Berbeda dengan studi e-government yang fokus pada layanan transaksional, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana digitalisasi mentransformasi proses pengambilan keputusan strategis dan koordinasi multi-level dalam kebijakan pembangunan keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi governansi digital di BKKBN mampu mentransformasi sistem pendataan dan monitoring program pembangunan keluarga secara komprehensif. Penelitian ini juga mempertanyakan tantangan utama yang muncul dalam proses integrasi teknologi digital ke dalam struktur birokrasi kependudukan yang tersebar hingga tingkat desa, terutama terkait kesiapan SDM, infrastruktur, dan harmonisasi alur kerja. Selain itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana governansi digital mampu mendukung optimalisasi bonus demografi melalui refocusing Program Bangga Kencana sebagai strategi nasional dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arsitektur governansi digital BKKBN beserta mekanisme integrasinya dengan ekosistem kebijakan kependudukan nasional. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi berbagai hambatan struktural maupun teknis yang muncul dalam implementasi digital governance di tingkat grassroots, khususnya pada level kecamatan dan desa. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi kontribusi transformasi digital terhadap peningkatan efektivitas intervensi bonus demografi melalui penguatan dan penyempurnaan Program Bangga Kencana.

Metode/ منهجية

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental sebagaimana dikemukakan Stake (1995), karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks implementasi governansi digital dalam konteks nyata transformasi kelembagaan BKKBN. Studi kasus

memberikan batas analitis yang jelas pada periode implementasi 2024–2025, sehingga dinamika kebijakan dan proses digitalisasi dapat diamati secara komprehensif sesuai pedoman metodologis Yin (2018). Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jakarta sebagai pusat koordinasi digitalisasi data kependudukan dan pembangunan keluarga. Fokus kajiannya meliputi arsitektur sistem informasi digital BKKBN, proses transformasi kelembagaan yang menyertai digitalisasi, mekanisme koordinasi berbasis platform digital, serta berbagai tantangan implementasi yang muncul di tingkat akar rumput hingga desa dan kecamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pada kunjungan lapangan (Kuliah Kerja Lapangan) ke BKKBN pada 11 November 2025, termasuk pengamatan terhadap presentasi narasumber, demonstrasi aplikasi digital, dan diskusi mengenai tata kelola digital.

Wawancara mendalam juga dilakukan dengan Prof. Budi Setiyono, Ph.D., selaku Sekretaris Kemendukbangga, serta Wakil Menteri Kependudukan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka untuk memperoleh perspektif strategis mengenai arah transformasi digital. Data pendukung diperoleh dari analisis dokumen seperti Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2024, laporan kinerja, publikasi BPS, serta literatur akademik relevan, dan diperkaya dengan penelusuran antarmuka New Siga serta dashboard monitoring program yang diperlihatkan dalam sesi presentasi. Analisis data dilakukan menggunakan thematic analysis Braun dan Clarke (2006) melalui proses familiarisasi, pengkodean, penyusunan tema, peninjauan ulang melalui triangulasi, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan akhir. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber—meliputi dokumen kebijakan, pernyataan narasumber, dan hasil observasi—serta melalui member checking dengan dosen pembimbing mata kuliah Governansi Digital. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena durasi observasi yang hanya satu hari sehingga belum mampu menggambarkan dinamika operasional harian secara utuh, serta karena akses yang lebih banyak kepada perspektif pimpinan tingkat atas sehingga tidak mencakup pengalaman pelaksana teknis di lapangan. Selain itu, karena penelitian dilakukan di kantor pusat tanpa verifikasi ke tingkat kabupaten, kota, dan desa, maka generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati.

Hasil / مناقشتها & Diskusi / نتائج البحث

A. Implementasi Governansi Digital Di BKKBN Mentransformasi Sistem Pendataan Dan Monitoring Program Pembangunan Keluarga

Transformasi governansi digital di BKKBN mengubah model pendataan keluarga dari sistem manual yang terfragmentasi menjadi ekosistem data terintegrasi melalui **Sistem Informasi Keluarga (SIGA)**. Digitalisasi ini mendorong akurasi, keseragaman, dan kecepatan data, sehingga seluruh proses kebijakan berbasis keluarga dapat dirancang menggunakan informasi yang lebih “clean dan real-time.” Pergeseran ini sesuai arah transformasi nasional yang memprioritaskan modernisasi birokrasi berbasis data. *BKKBN 2021; Janowski 2015*. New SIGA mengadopsi prinsip *digital by design* dengan mengintegrasikan fitur pendataan mobile, dashboard monitoring, dan pemetaan keluarga berisiko. Penyuluh keluarga kini menginput data langsung dari lapangan melalui perangkat digital, menghilangkan jeda pelaporan dan mengurangi human error yang biasa terjadi pada formulir manual. Model ini memperkuat fungsi SIGA sebagai data operasional—bukan hanya repository—yang langsung dipakai untuk intervensi. *Mergel 2019; BKKBN 2022*.

Akurasi SIGA diperkuat melalui mekanisme verifikasi dan validasi berlapis: mulai dari penyuluh KB, operator kabupaten/kota, hingga sistem pusat. Pendekatan ini mengikuti

standar *data governance* yang menekankan konsistensi, keandalan, dan auditability data. Dalam konteks kebijakan kependudukan, validitas data bukan cuma syarat teknis, tapi juga moral, mengingat setiap angka menentukan alokasi program seperti stunting, KB, dan ketahanan keluarga. *Janssen 2020; Kominfo 2023*.

Digitalisasi juga memperluas cakupan integrasi data lintas program, misalnya penggabungan layanan KB, logistik kontrasepsi, dan indikator ketahanan keluarga. SIGA menjadi platform yang memungkinkan pemetaan masalah secara multidimensi: kesehatan reproduksi, sosial-ekonomi, hingga kondisi lingkungan. Pendekatan *government as a platform* ini penting karena pembangunan keluarga tidak bisa dipisah-pisah; harus berbasis data terpadu. *Cordella 2015; BKKBN 2023*.

Dalam percepatan penurunan stunting, governansi digital memegang peran kunci. SIGA memetakan keluarga berisiko berdasarkan variabel gizi, usia ibu, jarak kehamilan, sanitasi, dan kesejahteraan. Data ini kemudian dipakai untuk *targeting precision*, memastikan intervensi tidak “random” tetapi berbasis bukti. Pendekatan analitik ini selaras dengan konsep *predictive governance* yang berkembang dalam administrasi publik modern. *Höchtel 2016; Kemenkes 2022*.

Optimalisasi bonus demografi juga sangat bergantung pada kualitas data digital BKKBN. Data SIGA digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga risiko fertilitas tinggi pada kelompok rentan. Keberhasilan bonus demografi ditentukan bukan oleh jumlah penduduk usia produktif semata, tetapi oleh kualitas perencanaannya yang seluruhnya dibangun di atas data keluarga yang valid. *Bloom 2003; BPS 2024*.

Secara keseluruhan, implementasi governansi digital membuat kerja pembangunan keluarga jauh lebih cepat, transparan, dan responsif. SIGA bukan lagi sekadar alat administrasi, tapi sudah naik kelas menjadi instrumen strategis yang menopang perencanaan nasional. Agar transformasi ini sustain, diperlukan penguatan literasi digital penyuluh, interoperabilitas lintas kementerian, dan pembaruan data konsisten setiap tahun. *OECD 2020; BKKBN 2024*.

B. Tantangan Utama Dalam Mengintegrasikan Teknologi Digital Ke Dalam Struktur Birokrasi Kependudukan Yang Tersebar Hingga Tingkat Desa

Integrasi teknologi digital dalam birokrasi kependudukan tingkat desa menghadapi tantangan mendasar berupa ketimpangan infrastruktur digital. Meskipun pemerintah telah memperluas jaringan 4G, banyak desa di wilayah 3T masih mengalami keterbatasan sinyal, listrik tidak stabil, hingga ketiadaan perangkat pendukung. Kondisi ini membuat transformasi digital tidak berjalan merata, karena sistem administrasi seperti pencatatan kependudukan, updating data keluarga, atau pelaporan digital tidak dapat beroperasi optimal. Ketimpangan ini sejalan dengan temuan riset global bahwa digitalisasi akan gagal bila fondasi infrastrukturnya belum memadai (Norris, 2001).

Selain infrastruktur, tantangan besar muncul dari rendahnya literasi digital aparatur desa. Banyak perangkat desa dan kader kependudukan masih mengandalkan pola kerja manual, sehingga adopsi aplikasi seperti SIGA, SIAK, dan sistem daring lainnya berjalan lambat. Minimnya pelatihan, beban administrasi tinggi, dan resistensi terhadap teknologi semakin memperlambat transformasi digital di akar rumput. Studi administrasi publik menegaskan bahwa kompetensi SDM adalah faktor paling menentukan keberhasilan digital government (Janowski, 2015).

Masalah lain yang menghambat digitalisasi adalah fragmentasi birokrasi. Sistem kependudukan di Indonesia masih terbagi antara BKKBN, Kemendagri (Dukcapil), Dinsos,

dan instansi lainnya yang sering menggunakan platform berbeda. Di tingkat desa, perangkat administrasi harus menginput data ke beberapa sistem yang tidak selalu terintegrasi. Ketidakselarasan ini meningkatkan beban kerja, risiko redundansi, dan potensi inkonsistensi data. Literatur digital governance menunjukkan bahwa fragmentasi seperti ini menghambat interoperabilitas dan efektivitas kebijakan publik (Cordella & Tempini, 2015).

Integrasi digital dalam birokrasi desa juga terkendala pada budaya organisasi yang masih hierarkis dan kurang adaptif terhadap inovasi. Banyak aparatur desa masih bekerja mengikuti pola administratif konvensional sehingga keberadaan sistem digital belum diposisikan sebagai kebutuhan utama. Transformasi digital menuntut budaya kerja yang kolaboratif, fleksibel, dan berbasis data—sesuatu yang menurut penelitian sering sulit dicapai di birokrasi lokal karena adanya mindset status quo (Mergel et al., 2019).

Tantangan berikutnya adalah minimnya regulasi operasional yang jelas di tingkat desa. Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait digital government, pelaksanaannya di desa sering tidak memiliki pedoman teknis yang kuat. Akibatnya, pemerintah desa kebingungan dalam menjalankan SOP digital, termasuk mekanisme verifikasi data, pembagian tugas operator, dan tata cara perlindungan data penduduk. Kesenjangan regulasi ini ditegaskan dalam riset tentang digital bureaucracy yang menunjukkan perlunya aturan teknis untuk memastikan konsistensi pelaksanaan (Janssen et al., 2020).

Selain itu, integrasi digital menghadapi hambatan pada aspek keamanan data. Pengelolaan data kependudukan yang sangat sensitif—mulai dari identitas warga, status keluarga, sampai kondisi sosial ekonomi—memerlukan sistem enkripsi, standar keamanan, dan tata kelola data yang kuat. Namun, desa sering tidak memiliki kapasitas teknis untuk menilai keamanan platform digital yang mereka pakai. Risiko kebocoran data menjadi serius karena desa adalah titik terdekat dengan sumber data primer. Literatur teknologi pemerintahan menegaskan bahwa keamanan data merupakan fondasi transformasi digital yang berkelanjutan (Kitchin, 2014).

Kendala pembiayaan juga menjadi isu besar dalam digitalisasi birokrasi kependudukan desa. Anggaran desa cenderung lebih banyak terserap untuk infrastruktur dasar, sehingga alokasi untuk perangkat digital, pelatihan, dan pemeliharaan sistem sangat terbatas. Padahal digitalisasi memerlukan dukungan pendanaan berkelanjutan agar perangkat tidak cepat rusak dan operator dapat terus dilatih. Perspektif ekonomi pembangunan menegaskan bahwa keberhasilan teknologi di wilayah lokal bergantung pada investasi jangka panjang, bukan sekadar pengadaan awal (Ali & Bailur, 2007).

Tantangan integrasi digital di tingkat desa juga muncul dari masalah sosial, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap teknologi baru, rendahnya partisipasi warga dalam pembaruan data, dan kecenderungan menghindari proses digital. Padahal keberhasilan sistem kependudukan digital sangat bergantung pada kualitas data yang diberikan masyarakat. Jika warga tidak kooperatif atau tidak terbiasa dengan proses digital, maka pemutakhiran data akan berjalan lambat dan akurasi berkurang. Penelitian ketahanan komunitas menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital memerlukan partisipasi masyarakat yang kuat dan konsisten (Walsh, 2016).

C. Governansi Digital Mendukung Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Refocusing Program Bangga Kencana

Indonesia saat ini berada pada periode emas bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-2035,

memberikan peluang besar bagi akselerasi pembangunan nasional (Adioetomo & Samosir, 2010). Namun, bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat dan inovatif. Tanpa pengelolaan yang optimal, bonus demografi justru berpotensi menjadi bencana demografi yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Governansi digital hadir sebagai solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pengelolaan bonus demografi. Governansi digital merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Prasojo, Kurniawan, & Holidin, 2018). Melalui digitalisasi layanan publik, pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, mengintegrasikan data lintas sektor, serta membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat. Transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan bukan hanya sekadar modernisasi teknologi, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat (Suhendra & Winarno, 2020).

Program Bangga Kencana (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) merupakan salah satu program strategis yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mewujudkan keluarga berkualitas Indonesia. Program ini tidak hanya fokus pada pengendalian kuantitas penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga melalui delapan fungsi keluarga yang meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan (BKKBN, 2019). Refocusing Program Bangga Kencana menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini dapat menjawab tantangan kontemporer dalam era digital dan sejalan dengan upaya optimalisasi bonus demografi (Nugroho, 2017).

Integrasi governansi digital dalam Program Bangga Kencana dapat dimulai dari digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan data keluarga. Saat ini, BKKBN telah mengembangkan aplikasi seperti Elsimil (Elektronik Siap Melayani dan Melindungi) untuk pendataan keluarga secara digital (BKKBN, 2019). Sistem ini memungkinkan kader KB dan petugas lapangan untuk mengumpulkan data real-time tentang kondisi keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, hingga indikator kesejahteraan keluarga. Data yang terkumpul secara digital ini dapat langsung terintegrasi dengan sistem pusat, memudahkan analisis big data untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap wilayah (Suhendra & Winarno, 2020).

Penerapan governansi digital juga memungkinkan interoperabilitas data antar lembaga pemerintah yang mendukung Program Bangga Kencana. Data kependudukan dari Dukcapil, data kesehatan dari Kementerian Kesehatan, data pendidikan dari Kemendikbud, dan data bantuan sosial dari Kemensos dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem digital (Prasojo, Kurniawan, & Holidin, 2018). Integrasi data ini memungkinkan identifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi secara lebih akurat, menghindari duplikasi program, serta memastikan bahwa bantuan dan layanan pemerintah tepat sasaran. Selain itu, data terintegrasi ini juga dapat digunakan untuk memantau progres pencapaian target bonus demografi secara nasional maupun regional (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Layanan digital dalam Program Bangga Kencana juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pengasuhan anak. Platform digital seperti aplikasi mobile, website informatif, dan chatbot berbasis AI dapat menyediakan informasi 24/7 tentang berbagai metode kontrasepsi, konseling pranikah, parenting, hingga kesiapan

menjadi orang tua (Wahyudi & Kusuma, 2021). Bagi generasi muda yang merupakan digital native, pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Mereka dapat mengakses informasi secara privat dan nyaman tanpa stigma sosial, sekaligus mendapatkan edukasi yang komprehensif tentang perencanaan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2019).

Refocusing Program Bangsa Kencana melalui governansi digital juga mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga melalui platform digital. BKKBN dapat berkolaborasi dengan platform e-commerce, fintech, dan lembaga pelatihan online untuk memberikan akses kepada keluarga terhadap peluang ekonomi digital (Nugroho, 2017). Misalnya, ibu rumah tangga dapat mengakses pelatihan kewirausahaan online, mendapatkan akses modal usaha mikro digital, atau memasarkan produk home industry melalui marketplace. Program seperti ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mempersiapkan generasi produktif untuk menghadapi ekonomi digital yang semakin dominan di era bonus demografi (Wahyudi & Kusuma, 2021).

Monitoring dan evaluasi program juga mengalami transformasi signifikan dengan governansi digital. Dashboard monitoring berbasis cloud computing memungkinkan pengambil kebijakan untuk memantau implementasi Program Bangsa Kencana secara real-time dari tingkat pusat hingga desa (Suhendra & Winarno, 2020). Key Performance Indicators (KPI) seperti angka kelahiran, prevalensi penggunaan kontrasepsi, indeks ketahanan keluarga, dan capaian delapan fungsi keluarga dapat divisualisasikan secara interaktif. Sistem early warning berbasis artificial intelligence dapat mendeteksi wilayah yang mengalami penurunan kinerja program sehingga intervensi korektif dapat dilakukan dengan cepat. Transparansi data ini juga meningkatkan akuntabilitas publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pemerintah (Prasojo, Kurniawan, & Holidin, 2018).

Optimalisasi bonus demografi melalui refocusing Program Bangsa Kencana berbasis governansi digital memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu terus berinvestasi dalam infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memastikan perlindungan data pribadi sesuai regulasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan transformasi digital ini. Dengan governansi digital yang efektif, Program Bangsa Kencana dapat menjadi katalis utama dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang berkualitas, produktif, dan sejahtera, sehingga bonus demografi benar-benar menjadi momentum transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing global (Adioetomo & Samosir, 2010).

Kesimpulan/ الخلاصة

Implementasi governansi digital di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menunjukkan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar alat administratif, melainkan fondasi strategis untuk membangun kebijakan kependudukan yang responsif, akurat, dan terukur. Digitalisasi melalui New SIGA, Elsimil, dan berbagai platform berbasis data telah mentransformasi pendataan keluarga dari sistem manual menjadi ekosistem data real-time yang memungkinkan perumusan program pembangunan keluarga dilakukan secara berbasis bukti (*evidence-based policy*). Mekanisme verifikasi dan validasi berlapis memperkuat kualitas data sehingga mampu menjadi rujukan utama bagi kebijakan stunting, ketahanan keluarga, dan layanan KB.

Di sisi lain, integrasi digital di tingkat akar rumput masih menghadapi hambatan struktural berupa ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, fragmentasi platform antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif. Tantangan ini menunjukkan bahwa modernisasi digital tidak dapat berjalan secara otomatis, tetapi memerlukan investasi jangka panjang dalam kapasitas SDM, infrastruktur desa, dan interoperabilitas kebijakan lintas lembaga.

Governansi digital terbukti menjadi instrumen penting dalam mendukung optimalisasi bonus demografi melalui refocusing Program Bangga Kencana. Digitalisasi memungkinkan pemetaan keluarga berisiko secara presisi, mempercepat intervensi kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas layanan KB, serta menyediakan dashboard monitoring yang memudahkan pengambil kebijakan menganalisis capaian program secara real-time. Dengan demikian, transformasi digital memperkuat kemampuan negara dalam merancang intervensi demografi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan bahwa bonus demografi hanya dapat dioptimalkan apabila pemerintah mampu mengelola data kependudukan secara akurat, mengintegrasikan sistem digital lintas sektor, dan memastikan bahwa transformasi digital berjalan hingga tingkat desa tanpa meninggalkan kelompok rentan. Governansi digital, bila diterapkan secara konsisten, menjadi katalis menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas keluarga dan generasi produktif.

Referensi/ المراجع والمصادر

- Adioetomo, S.M., & Samosir, O.B. (2010). *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, M., & Bailur, S. (2007). The Challenge of "Sustainability" in ICT4D: Is Bricolage the Answer? *Proceedings of the 9th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries*, São Paulo, Brazil.
- APJII. (2024). *Survei Penetrasi Internet di Indonesia 2024*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Bertot, J.C., Jaeger, P.T., & Grimes, J.M. (2010). Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-271.
- BKKBN. (2019). *Strategi Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2021). *Laporan Kinerja BKKBN 2021*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2022). *Panduan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2023). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2024). *Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- BKKBN. (2025). *Program Bangga Kencana: Panduan Implementasi*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Bloom, D.E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Bloom, D.E., Chatterji, S., Kowal, P., Lloyd-Sherlock, P., McKee, M., Rechel, B., Rosenberg, L., & Smith, J.P. (2014). Macroeconomic Implications of Population Ageing and Selected Policy Responses. *The Lancet*, 385(9968), 649-657.
- BPS. (2024). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and Organizational Change: Reappraising the Role of ICT and Bureaucracy in Public Service Delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279-286.
- Dawes, S.S. (2008). The Evolution and Continuing Challenges of E-governance. *Public Administration Review*, 68(s1), S86-S102.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New Public Management is Dead—Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467-494.
- Gil-García, J.R. (2012). *Enacting Electronic Government Success: An Integrative Study of Government-wide Websites, Organizational Capabilities, and Institutions*. New York: Springer.
- Höchtel, J., Parycek, P., & Schöllhammer, R. (2016). Big Data in the Policy Cycle: Policy Decision Making in the Digital Era. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 26(1-2), 147-169.
- Janowski, T. (2015). Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221-236.
- Janssen, M., van der Voort, H., & Wahyudi, A. (2020). Factors Influencing Big Data Decision-Making Quality. *Journal of Business Research*, 70, 338-345.
- Kemenkes. (2022). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Kependudukan untuk Pemanfaatan Bonus Demografi 2020-2035*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kitchin, R. (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences*. London: SAGE Publications.
- Kominfo. (2023). *Panduan Tata Kelola Data Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kominfo. (2024). *Statistik Portal Data Terbuka Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lee, R., & Mason, A. (2006). What is the Demographic Dividend? *Finance and Development*, 43(3), 16-17.
- Lutz, W., Butz, W.P., & KC, S. (2014). *World Population and Human Capital in the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Edisi Keenam). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- OECD. (2020). *Digital Government Index: 2019 Results*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Kepala BKKBN No. 6 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Philip, L., Cottrill, C., Farrington, J., Williams, F., & Ashmore, F. (2015). The Digital Divide: Patterns, Policy and Scenarios for Connecting the 'Final Few' in Rural Communities across Great Britain. *Journal of Rural Studies*, 54, 386-398.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2018). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Rahmawati, D., Wibowo, A., & Santoso, B. (2023). Implementasi Digitalisasi Program Keluarga Berencana di Wilayah Terpencil Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112-128.
- Stake, R.E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Suhendra, A., & Winarno, T. (2020). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(2), 145-162.
- Sukamdi. (2025). Bonus Demografi Indonesia: Peluang dan Tantangan 2025-2040. *Populasi: Journal of Population Studies*, 33(1), 1-15.
- United Nations. (2024). *World Population Prospects 2024*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Wahyudi, I., & Kusuma, H. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Bonus Demografi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(1), 78-95.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening Family Resilience* (Third Edition). New York: The Guilford Press.
- Wihaji. (2025). Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia di Era Bonus Demografi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 20(1), 23-38.
- Yin, R.K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edition). Thousand Oaks: SAGE Publications.